



Jumlah PBI di Pontianak Capai 20 Ribu

Pemkot

Anggarkan

Premi

JKN-KIS

Rp9,5 Miliar



Sidiq Handanu
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak

“Pertambahannya sekitar dua ribu hingga tiga ribu PBI. Namun demikian, jumlah pasti bertambahnya PBI itu berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial”

PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak di tahun 2020 mengalokasikan dana Rp9,5 miliar untuk membayar premi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi warga tidak mampu yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iu-

ran (PBI) dari pemerintah. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, anggaran tersebut diperuntukkan agar masyarakat miskin terbantu. Selain itu peningkatan kualitas hidup masyarakat juga diharapkan bisa meningkat. Anggaran tersebut otomatis

• **Baca Halaman 15**

Hal 9 ■ **pemkot anggaran**

akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita berharap agar kualitas hidup masyarakat meningkat karena dengan peningkatan itu maka masyarakat yang sakit akan semakin berkurang,” ucap Edi Rusdi Kamtono, kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu menjelaskan, anggaran sebesar itu tidak hanya untuk pembayaran premi jumlah PBI yang ada di Pontianak, tetapi juga untuk mengantisipasi penyesuaian kenaikan iuran.

Diketahui, premi untuk peserta program JKN-KIS kelas III bagi warga PBI naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Pemerintah pusat sebelumnya menanggung selisih premi bagi penerima bantuan iuran selama Oktober hingga Desember 2019.

“Kami mengantisipasi selisih kenaikan hampir Rp10 miliar. Jadi anggaran Rp9,5 miliar untuk membayar premi peserta JKN-KIS penerima bantuan iu-

ran dari pemerintah dengan mengantisipasi kemungkinan masih ada selisih premi yang belum dibayarkan,” katanya.

Bertambahnya anggaran itu juga untuk pembayaran premi PBI yang dibiayai APBD Kota Pontianak. Pasalnya, jumlah penerima bantuan iuran yang pembayaran preminya dibiayai pemerintah daerah juga bertambah dari 17 ribu pada tahun 2019 menjadi sekitar 20 ribu tahun 2020.

“Pertambahannya sekitar dua ribu hingga tiga ribu PBI. Namun demikian, jumlah pasti bertambahnya PBI itu berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial,” katanya.

Sidiq menyebutkan, Pemkot Pontianak saat ini memiliki sistem laporan rujukan terpadu. Sistem laporan itu berada di Dinas Sosial. Setiap permasalahan sosial yang dialami masyarakat Kota Pontianak akan masuk dalam sistem laporan ini.

“Termasuk persoalan sosial masyarakat yang pem-

bayaran premi BPJS mandek atau mengalami musibah,” ujarnya.

Melalui sistem ini, persoalan sosial yang dihadapi masyarakat dipilah berdasarkan kategori yang ada. Sistem ini pula memungkinkan pemerintah daerah mengecek kelayakan warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran JKN-KIS di Dinas Sosial.

“Untuk pembayaran PBI di Kota Pontianak tidak hanya dibiayai dari APBD Pontianak melainkan juga dari APBD Provinsi Kalbar dan APBN. Untuk PBI APBN mencapai 100 ribu jiwa. Meski demikian jumlah itu belum mencakup keseluruhan masyarakat miskin di Kota Pontianak, karena data masyarakat miskin dinamis. Bisa saja yang bersangkutan di PHK atau musibah dan kemudian masuk kategori tidak mampu,” ujar Sidiq.

“Tetap masih ada, karena data masyarakat miskin dinamis. Bisa saja yang bersangkutan di PHK atau musibah dan kemudian ma-

suk kategori tidak mampu,” tuturnya.

Sementara untuk data mengenai peserta JKN-KIS penerima bantuan iuran yang preminya ditanggung APBD Provinsi Kalbar, saat ini masih dalam proses sinkronisasi data. Sinkronisasi data dilakukan agar tidak ada data ganda. Sebab masyarakat yang sudah masuk dalam kategori PBI Kota maupun APBN tidak boleh lagi masuk pada PBI APBD Provinsi, dimana jumlah yang diusulkan sebanyak 25 ribu PBI.

“Sinkronisasi data PBI ini melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS Kesehatan,” kata dia.

Sidiq melanjutkan, keterlibatan Dinas Kependudukan Catatan Sipil sangat penting karena memastikan penerima PBI di Kota Pontianak harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Tidak ada NIK-nya maka tidak bisa juga masuk dalam PBI di Kota Pontianak,” tutupnya. **(din)**